

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini seringkali kita dihadapkan dengan perilaku warga negara yang kurang memiliki nilai-nilai kebajikan/keadaban. Sebagaimana penelitian terdahulu oleh Fitriasari (2017) menyatakan warganegara kurang memiliki nilai-nilai keadaban/kebajikan seperti adanya konflik antar kelompok, intoleransi, tindakan kekerasan, berbagai pelanggaran hukum seperti pencurian, kurangnya peduli sosial terhadap sesama, kurangnya kemandirian, banyaknya masyarakat menjadi pengemis untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Padahal sejatinya di Indonesia ada larangan untuk mengemis sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2) pasal 504, Buku ketiga tentang tindak pidana pelanggaran, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP, 1915) dan Peraturan Daerah seperti pasal 40 Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 207 tentang ketertiban umum serta ayat (1) pasal 50 Bab XV Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat, 2012). Terlebih di saat pandemi *covid-19* ini terlihat jelas kurangnya kemandirian masyarakat yang Sebagian dari masyarakat sangat tergantung pada bantuan sosial dari pemerintah. Berdasarkan data dari CNN Indonesia (2020) diperoleh gambaran bahwa :

Pemerintah mengeluarkan biaya sebanyak Rp695,2 triliun untuk menanggulangi pandemi *covid-19* di tahun 2020. Biaya tersebut diperuntukkan bermacam sektor. Perinciannya dana bansos Rp203,9 triliun, UMKM Rp123,46 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah Rp106,11 triliun, kesehatan Rp87,55 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp53,55 triliun. Alokasi biaya dalam penanggulangan pandemi tahun 2021 Rp356,5 triliun. Totalnya 51,28 persen dari total biaya penanganan pandemi setahun lalu yakni Rp695,2 triliun. Biaya tersebut juga dikeluarkan untuk berbagai sektor. Rinciannya, sektor Kesehatan Rp25,3 triliun, perlindungan sosial Rp110,2

triliun, insentif usaha Rp20,4 triliun, pembiayaan korporasi Rp14,9 triliun, UMKM Rp48,8 triliun, dan sektoral K/L dan Pemda Rp136,7 triliun.

Kurangnya kesadaran akan bencana (Fitria, Sukmayadi, Suryadi, dan Rosyidie, 2021) dan ancaman digital juga menjadi masalah krusial. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2018 tentang Penetrasi dan Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia menyatakan 55,9% pengguna internet terpapar pornografi. Begitu pula dengan adanya berita hoax, ujaran kebencian (hate speech) di media sosial, maraknya prostitusi dan perjudian online.

Pandemi *Covid-19* yang melanda secara global termasuk Indonesia berdampak pada berbagai bidang, termasuk sosial ekonomi (Apandie dan Karolina 2019; Sapriya dkk, 2019). Perekonomian menjadi terpuruk dan menimbulkan masalah kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial, serta masalah sosial lainnya. Terjadi peningkatan jumlah angka kemiskinan dan pengangguran. “Persentase penduduk miskin terhitung sampai September 2020 sebesar 10,19 persen, mengalami peningkatan 0,41 persen poin terhadap Maret 2020. Jumlah penduduk miskin sampai September 2020 sebesar 27,55 juta orang, peningkatan 1,13 juta orang terhadap Maret 2020. Pengertian penduduk miskin adalah penduduk yang pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan”(BPS, 2021).

Lonjakan jumlah pengangguran juga terjadi. “Tingkat pengangguran terbuka terhitung Agustus 2020 sebesar 7,07 persen dari 5,23 persen. Terhitung 29,12 juta penduduk usia kerja terdampak oleh pandemi. Sebesar 2,56 juta penduduk menjadi pengangguran, 1,77 juta penduduk sementara tidak bekerja, serta sebesar 24,03 juta penduduk mengalami pengurangan jam kerja” (BPS, 2021).

Akibat pandemi juga terjadi di daerah Jawa Barat. Pernyataan Fatimah (2021) Koordinator Fungsi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, “per September 2020, total penduduk miskin di Jawa

Barat mengalami kenaikan sekitar 268.290 jiwa menjadi 4,19 juta jiwa, angka garis kemiskinan di Jawa Barat sebesar Rp415.682 per kapita per bulan, naik dari Rp410.988. Penduduk usia kerja juga terdampak pandemi sebanyak 6,36 juta dari total 37,51 juta atau 16,9 persen. Secara detail, 0,70 juta menganggur, 0,16 juta menjadi bukan angkatan kerja, 0,40 juta sementara tidak bekerja, dan 5,10 juta pekerja mengalami pengurangan jam kerja”. (jabar.inews.id, 2021).

Dari kenyataan di atas warga negara dan pemerintah belum siap menghadapi kejadian pandemi ini. Padahal Indonesia memiliki sumber daya yang banyak baik dari segi alam, sosial, dan manusia, memiliki modal yang lebih dari cukup. Hal ini sebagaimana hasil penelitian Nuryanti (2019, hlm. 87) menyatakan modal tersebut seharusnya dapat digunakan untuk upaya-upaya mensejahterakan rakyat. Namun sumber daya tersebut belum dikelola dengan mandiri dan kreatif. Sebagaimana penelitian Saepuddin (2015) kemampuan warga negara Indonesia masih terbatas sehingga masih kurang produktif. Pendidikan juga selama ini cenderung mengarahkan masyarakat untuk menjadi pekerja, bukan menciptakan pekerjaan sehingga masih kuatnya paradigma di masyarakat menjadi pekerja lebih baik daripada menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan alasan tidak mau menanggung resiko kerugian. Ditambah lagi dengan masalah jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan pencari kerja. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan pemerintah Indonesia memiliki keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan dana untuk pembangunan juga menjadi masalah yang krusial.

Indonesia juga akan menghadapi bonus demografi yang akan terjadi dalam kurun waktu 2030-2045. Menurut BKKBN bahwa bonus demografi adalah keadaan populasi usia produktif lebih banyak dari usia non-produktif. Puncaknya di Indonesia akan terjadi tahun 2030 mendatang. Potensi pemuda sebagai usia produktif dalam perekonomian Indonesia sangat besar dan sebagai pembaharu (*agent of change*). Potensi ini jika tidak dikelola dengan baik tentu saja akan menjadi bumerang bagi pemerintah dan

masyarakat. Oleh sebab itu Bonus demografi tersebut harus dimanfaatkan untuk menciptakan peluang agar produktifitas pemuda dapat menjadi kemajuan perekonomian negara (Suyatna dan Hasanah, 2018, hlm. 527).

Jumlah masyarakat yang menjadi pekerja lebih banyak daripada yang menciptakan lapangan pekerjaan (*entrepreneur*). Menurut informasi Kementerian Koperasi dan UKM jumlah *entrepreneurship* Indonesia 3,5 persen dari keseluruhan jumlah penduduk (katadata, 2019). Jumlah ini masih jauh dari yang diharapkan sebagaimana pendapat dari Mardani H. Maming Wakil Bendahara Umum BPP HIPMI salah satu parameter kekuatan perekonomian nasional suatu negara bisa diperhatikan melalui perbandingan jumlah *entrepreneur* dibanding jumlah penduduk. Pada umumnya negara maju dengan kestabilan perekonomian, memiliki perbandingan *entrepreneur* 14 persen. Dengan demikian 14 persen masyarakat negara itu adalah *entrepreneur*. *Entrepreneur* dapat diharapkan memberdayakan masyarakat di bidang sosial ekonomi. *Entrepreneur* bisa memakmurkan masyarakat dan dapat membuat berjalannya ekonomi negara dengan menjalin kerjasama dengan pemerintah. Hal ini karena *entrepreneurship* dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan pembayar pajak untuk pendapatan negara. Sedangkan peran pemerintah sebagai regulator, memberi fasilitas dan mendorong agar tercipta kemajuan dalam ekonomi. Ekonomi ini dapat tumbuh dengan baik jika *adanya entrepreneur* yang berkolaborasi dengan pemerintah (Astamoen, 2008). Diharapkan setiap warga negara memiliki kemampuan dan produktif dalam masalah ekonomi. Karena sistem demokrasi akan berhasil baik jika ekonomi stabil. (Danial, 2007).

Gambaran kesenjangan tersebut sejatinya menuntut setiap warga negara harus mencerminkan perannya sebagai warga negara yang baik/beradab (*civic virtue*). *Civic virtue* adalah kebaikan atau tolak ukur tingkah laku yang benar berhubungan dengan keikutsertaan warga negara dalam kepentingan publik. *Civic virtue* merupakan bentuk pengabdian warga negara untuk kesejahteraan komunitasnya (Blanken, 2012). Salah

satu ciri *civic virtue* adalah kesadaran akan bencana dan kemauan untuk terlibat mengatasinya (Fitria, Sukmayadi, Suryadi, dan Rosyidie, 2021). Menurut Washington (1993) ada empat kategori *civic virtue* yaitu pengetahuan kewarganegaraan, pengendalian diri, sikap tegas terhadap diri sendiri dan kemandirian warga negara. Kesadaran akan bencana dan kemauan untuk terlibat mengatasinya serta komponen *civic virtue* kemandirian warga negara pada saat pandemi *Covid-19* seperti ini tentu saja merupakan hal yang penting agar warga negara memiliki jiwa semangat berdiri sendiri mencukupi kebutuhan dasar (ekonomi, pendidikan dan kesehatan).

Untuk menanggulangi masalah sosial tersebut dan mengurangi tingkat kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat saat ini kemandirian dan peran masyarakat terutama *entrepreneur* sangat diharapkan untuk menopang perekonomian negara. Masalah kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial, serta masalah sosial lainnya tidak terselesaikan hanya dengan pemberian bantuan langsung pada masyarakat terdampak seperti yang telah dilakukan pemerintah sejak pandemi *covid-19* ini. Bila hal ini terus dilakukan kas dan pendapatan negara akan menipis, hutang negara pada luar negeri akan membengkak lambat laun negara akan kolaps. Alangkah baiknya masalah tersebut diselesaikan dengan cara pemberdayaan dan pengembangan aspek sosial-ekonomi warga negara maupun masyarakat yang mandiri, produktif, dan kreatif.

Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan bukan hanya *entrepreneur* yang hanya terfokus pada profit semata, namun para *entrepreneur* yang berjiwa sosial yang memiliki misi untuk memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekitarnya untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi serta masalah lainnya. Mengapa harus *social entrepreneur*? Karena seorang *social entrepreneur* bertindak menjadi *agent of change* di bidang sosial, penciptaan dan mempertahankan misi nilai sosial (bukan hanya nilai pribadi), pengakuan tiada berhenti mendapatkan

Rina Susanti, 2022

PEMBINAAN CIVIC VIRTUE DI BIDANG SOSIAL EKONOMI MELALUI SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

(Studi Kasus Di Sacita Muda Indonesia Elaborasi)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perustakaan.upi.edu

kesempatan baru dalam menjalankan misinya, sebagai inovator, beradaptasi, belajar berkesinambungan, berani menanggung resiko, bertanggung jawab pada konstituensi yang dilayani dan untuk hasil yang tercipta sehingga tercapai kesetaraan antara profit dan pengaruh nyata bagi lingkungan sosial, dengan begitu terwujud masyarakat mandiri dan sejahtera (Dees, 1998; Saragih dan Elizabet, 2020). Dengan demikian *Social entrepreneurship* memegang peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian negara dan diharapkan dapat membina *civic virtue*.

Hasil penelitian Mair dan Noboa (2003) menunjukkan bahwa minat *social entrepreneurship* berasal dari beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku kewirausahaan. Model *social entrepreneurship* secara khusus dipengaruhi oleh faktor kognitif (karakter dan moral) dan faktor karakteristik individu (emosi dan empati), menjadikan *social entrepreneur* fokus membantu sesama.

Agar muncul *entrepenuer* yang berjiwa sosial perlu adanya pendidikan *social entrepreneurship* di lembaga pendidikan seperti di Perguruan Tinggi untuk pengembangan program-program wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada sektor pengabdian. Berlandaskan dokumen Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020) diterangkan format aktivitas umum pada kebijakan kampus merdeka meliputi : pertukaran pelajar, magang, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, proyek independen, membangun desa serta kuliah kerja nyata berkonsepkan tematik. Peran serta perguruan tinggi dalam pendidikan *social entrepreneurship* terhadap mahasiswa akan menghasilkan *entrepreneur*, kolaborasi dengan industri, pemberdayaan masyarakat, sampai bentuk dan teori-teori baru diciptakan dari hasil penelitian yang terukur, terarah, dan berkelanjutan (Hasanah, 2018). Selain itu juga dapat melalui perusahaan *social enterprise* yang prososial, organisasi dan komunitas yang bergerak sesuai visi dan misi *social entrepreneurship*

sehingga dapat membentuk pemikiran, karakter dan tingkah laku warga negara menjadi *social entrepreneur* yang mandiri, kreatif, dan inovatif.

Studi ini merupakan penelitian PKn pada ranah sosio kultural terpusat pada *social entrepreneurship* dalam rangka pembinaan *civic virtue*. Menurut pendapat Palesangi (2012) *social entrepreneurship* mengglobal ketika Muhammad Yunus tahun 2006 meraih hadiah nobel atas kepeloporannya mengembangkan pinjaman dalam skala kecil dan bisnis sosial (Grameen Bank). Konsep *social entrepreneurship* juga berkembang pada perguruan tinggi di Inggris yakni *Skoll Center for Social Entrepreneurship di Oxford University*. Di Amerika Serikat berdiri pusat-pusat kajian *social entrepreneurship*, contohnya *Center for the Advancement of Social entrepreneurship di Duke University*. Penerapan *social entrepreneurship* dilakukan oleh yayasan mendunia *Ashoka Foundation*, yang melakukan pembinaan dan pemberian dana bagi *social entrepreneur* diberbagai negara (Hasanah, 2018). Hal ini berdampak positif bagi *social entrepreneurship* di Indonesia dengan mulai dibentuknya pusat kajian *social entrepreneurship* di perguruan tinggi, juga dibentuk Asosiasi Kewirausahaan Sosial Indonesia (AKSI). Hasil penelitian yang dilakukan oleh British Council (2018) telah menunjukkan terdapat 342.000 *social entrepreneur* di Indonesia. Terdapat tiga faktor yang diminati dalam dunia wirausahawan sosial, yakni industri kreatif sebanyak 22%, agrikultur dan perikanan sebanyak 16%, dan dibidang pendidikan sebanyak 15%. Pelaku bisnis di bidang sosial ini berasal dari generasi muda yang rata-rata berusia 18-34 tahun dengan presentase sebanyak 67%. Fakta tersebut menandakan berbagai kalangan yakin *social entrepreneurship* salah satu jalan menyelesaikan problem-problem sosial di Indonesia (Utomo, 2015, hlm. 1)

Social entrepreneurship bisa memfasilitasi bermacam kegiatan program guna memberi pengaruh dengan rantai manfaat yang panjang serta mengarah sikap mandiri, bukan lagi kegiatan pemberdayaan dan kegiatan sosial seperti selama ini berkaitan dengan sumbangan, rasa belas kasihan

serta berbagai aktifitas kurang mandiri. *Social entrepreneurship* diprogramkan dengan berbagai aktivitas agar dapat memberikan kebaikan pada objek sosial tujuannya dan mengarah untuk penyebaran nilai guna dan nilai tambah yang besar untuk masyarakat. Aktivitas bisnis-bisnis sosial, visi dan misi diarahkan untuk dapat memiliki dampak bagi kemandirian objek dan pelakunya. Maka studi ini berupaya menjelaskan upaya *community civic* dalam pembinaan *civic virtue* di bidang sosial ekonomi melalui *social entrepreneurship*. Dalam penelitian ini, terungkap deskripsi program-program, usaha, hasil, kendala, faktor pendorong dan dampak (impact) *social entrepreneurship* untuk pembinaan *civic virtue* dan pembentukan budaya kewarganegaraan yang lebih partisipatif.

Peneliti mengidentifikasi urgensi penelitian yaitu. *Pertama* menganalisis sejauh mana *social entrepreneurship* bisa meningkatkan kemandirian, kerjasama (kooperatif), dan sikap peduli sosial di kalangan warga negara. *Kedua*, akan digambarkan keikutsertaan warga negara di bidang sosial ekonomi melalui *social entrepreneurship*. Keduanya berasal dari perubahan sosial dengan tujuan memperbaiki warga negara dan budaya kewarganegaraan dengan partisipasi yang lebih tinggi melalui *social entrepreneurship* yang seharusnya didukung oleh berbagai kalangan baik pemerintah, pihak akademik, dan pihak swasta, NGO, dan media massa. Untuk menumbuhkan jiwa *social entrepreneurship* kepada setiap warga negara tentu saja dibutuhkan waktu yang panjang dan berkelanjutan, serta semua komponen baik dari keluarga, masyarakat dan pemerintah harus memiliki perannya masing-masing. Jika warga negara mempunyai jiwa *social entrepreneurship* bisa menjadi pribadi yang lebih bertanggungjawab untuk kehidupan pribadi maupun sosial sehingga bisa berpartisipasi dalam masyarakat di berbagai bidang (*civic virtue*).

Di Indonesia saat ini *social entrepreneurship* sudah menjadi trend dikalangan generasi muda. Penelitian (Suyatna & Nurhasanah, 2017) menyatakan pemuda melalui berbagai kecepatan teknologi serta canggih memulai pencarian kesempatan *social entrepreneurship* sebagai alternatif

bertahan. Pemanfaatan kecanggihan teknologi sebagai modal bisnis oleh pemuda menguntungkan berpeluang untuk masyarakat di lingkungannya dalam memanfaatkan teknologi itu. Hal ini dapat dilihat banyaknya *social entrepreneur* yang masih berusia muda seperti pada table berikut :

Tabel 1.1
Pemuda sebagai *Social Entrepreneur*

Nama Pendiri	Yayasan	Fokus <i>Social entrepreneurship</i>
Goris Mustaqim	Asgar Muda Garut	pemberdayaan pemuda (Garut, Jawa Barat) pada bidang pendidikan, kewirausahaan dan pembinaan masyarakat
Elang Gumilang	Elang Grup	penyediaan bagi masyarakat dengan penghasilan rendah yakni rumah sederhana serta sehat
M. Junerasono	Greneration Indonesia	mempromosikan gaya hidup ramah lingkungan

Sumber: Diadaptasi dari Palesangi, 2012

Pelaksanaan pengembangan *social entrepreneurship* yang dilaksanakan Perguruan Tinggi di Indonesia melalui berbagai program seperti dalam tabel berikut :

Tabel 1.2
Pelaksanaan program *social entrepreneurship* di Perguruan Tinggi Indonesia

Rina Susanti, 2022

PEMBINAAN CIVIC VIRTUE DI BIDANG SOSIAL EKONOMI MELALUI SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
(Studi Kasus Di Sacita Muda Indonesia Elaborasi)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perustakaan.upi.edu

Nama Perguruan Tinggi	Program	Tujuan
FISIPOL UGM Jogjakarta	Akademi Kewirausahaan Masyarakat (AKM)	Pemberian peluang untuk sarjana yang belum bekerja untuk terjun dalam <i>social entrepreneurship</i>
Universitas Islam Indonesia Jogjakarta	<i>Social Project Competition</i>	Penciptaan lulusan dengan kemandirian usaha sekaligus rasa peduli sosial dan adanya keseimbangan kompetensi akademis, tingkah laku, berkarya dengan tujuan mengembangkan diri masyarakat, sebagai <i>profesionalism social entrepreneur</i> serta mandiri
STISIPOL Candramuka Palembang	Pembentukan Lembaga Pusat Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan Sosial (P2BKS)	Untuk memberi pemahaman pada civitas akademika di lingkungan STISIPOL Candramuka Palembang tentang konsep <i>social entrepreneurship</i>

Sumber: Diadaptasi dari Hasanah, 2018

Program *social entrepreneurship* juga dilaksanakan di organisasi, perusahaan dan komunitas. Organisasi dengan model *social entrepreneurship* seperti Bali Recycling memberikan solusi terkait pengelolaan sampah di Bali, Rumah Cemara, CD Bethesda, dan Greeneration yang telah mengembangkan berbagai wirausaha sosial (seperti warung makan, pendidikan akupunktur, dan penjualan produk), dan memberikan layanan kepada generasi muda, serta menyediakan dukungan keluarga, perlindungan anak, penggalangan dana, serta peningkatan layanan

yang berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan remaja dan anak-anak marjinal. (Kusumasari, 2015).

Sacita Muda Indonesia Elaborasi di Bandung, Jawa Barat merupakan perusahaan yang fokus pada pendidikan, pemberdayaan dan penelitian. Dimulai dengan lembaga sosial yang bertujuan untuk mengembangkan produk lokal dalam menciptakan kemakmuran dan kemandirian di masyarakat. Sacita Muda Indonesia Elaborasi menciptakan lebih banyak kemakmuran dan kemandirian dengan menciptakan dan mengembangkan dampak pengusaha, yang dapat menyelesaikan masalah sosial dengan pendekatan kewirausahaan (Profil Sacita Muda Indonesia Elaborasi, 2020).

Dari penelitian terdahulu dan literatur yang ada pembinaan *civic virtue* di bidang sosial dapat dilaksanakan melalui berbagai cara namun belum ada yang meneliti mengenai pembinaan *civic virtue* di bidang sosial ekonomi melalui *social entrepreneurship* dengan studi di Sacita Muda Indonesia, Bandung. Hal ini menjadi kebaruan (*novelty*) dari penelitian yang akan peneliti lakukan. *Pertama* Eksistensi Sacita Muda Indonesia Elaborasi dalam pembinaan *civic virtue* di bidang sosial ekonomi melalui *social entrepreneurship* yang meliputi latar belakang, pelaksanaan visi, misi, tujuan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekitarnya melalui *social entrepreneurship*. Peneliti berharap hasil penelitian ini yang pertama dapat menjelaskan tentang peran masyarakat sipil memberdayakan masyarakat untuk mandiri, kerjasama (kooperatif), dan sikap peduli sosial untuk membina *civic virtue* di bidang sosial ekonomi. Hal tersebut sebagai solusi mengatasi masalah sosial dan ekonomi.

Realitas dan kekhasan *social entrepreneurship* Sacita Muda Indonesia Elaborasi adalah ekosistem inklusif yang dirancang sebagai model pengembangan kewirausahaan pemula berbasis *social entrepreneurship*. Sacita Muda Indonesia Elaborasi merupakan perusahaan yang fokus pada pendidikan, pemberdayaan dan penelitian. Dimulai dengan

Rina Susanti, 2022

PEMBINAAN CIVIC VIRTUE DI BIDANG SOSIAL EKONOMI MELALUI SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

(Studi Kasus Di Sacita Muda Indonesia Elaborasi)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perustakaan.upi.edu

tujuan untuk mengembangkan produk lokal dalam menciptakan kemakmuran dan kemandirian di masyarakat. Sacita Muda Indonesia Elaborasi menciptakan lebih banyak kemakmuran dan kemandirian dengan menciptakan dan mengembangkan dampak pengusaha, untuk penyelesaian masalah sosial menggunakan pendekatan *design thinking* dengan model bisnis sosial diarahkan membentuk para penggerak dan pemberdaya dengan visi sosialnya dan penerapan bermacam sumber daya lokal dengan nilai tambah yang tinggi dan memiliki pengaruh positif untuk lingkungan sekitarnya..

Gambaran program-program Sacita Muda Indonesia dari hasil studi pendahuluan meliputi program inovasi sosial dan pengembangan komunitas (*community development*), pendidikan transformatif, pemecahan masalah dengan pendekatan *design thinking* untuk inovasi manajemen sumber daya manusia, bimbingan (*mentorship*), dan pendampingan dalam pengembangan produk komunitas, kegiatan penelitian untuk mengembangkan produk lokal dan *Sociopreneurship* (Profil Sacita Muda Indonesia Elaborasi, 2020).

Hal khusus lainnya dari Sacita Muda Indonesia adalah kekuatannya terletak pada *social entrepreneur* muda berusia antara 18–34 tahun yang berbisnis secara kooperatif sebagai inkubator. Sebagaimana kita ketahui pemuda adalah sebagai agen pembaharu (*agent of change*) apalagi sebagai *social entrepreneur* yang dapat menularkan jiwa dan semangat mandiri, kerjasama (kooperatif), dan sikap peduli sosial bagian dari karakter *civic virtue*.

Kedua, mengenai pelaksanaan program kerja Sacita Muda Indonesia (SMI) Elaborasi sebagai *social entrepreneurship* dalam rangka pembinaan *civic virtue* di bidang sosial ekonomi. Pada bagian ini peneliti akan menyajikan program, proses perancangan dan pelaksanaan program, kendala serta upaya mengatasi kendala dalam pembinaan *civic virtue* di bidang sosial ekonomi melalui *social entrepreneurship*.

Ketiga mengenai kompetensi kewarganegaraan yang dibentuk dalam proses pembinaan *civic virtue* di bidang sosial ekonomi melalui *social entrepreneurship* yang dilaksanakan Sacita Muda Indonesia Elaborasi. Hal ini merupakan bagian dari kompetensi warga negara dalam pandangan Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan, sikap atau watak/karakter kewarganegaraan, dan kemampuan kewarganegaraan serta kebijakan warga negara. Dalam hal ini peneliti fokus pada kompetensi watak/karakter kewarganegaraan (*civic disposition*). Menurut CCEC (dalam Kalidjernih dan Winarno, 2019) *civic virtue* terdiri dari: *civic disposition* dan *civic commitment*.

Keempat tentang hasil dan dampak pelaksanaan program kerja Sacita Muda Indonesia Elaborasi sebagai *social entrepreneurship* dalam upaya pembinaan *civic virtue* di bidang sosial ekonomi meliputi hasil dan dampak (*impact*) dari program Sacita Muda Indonesia Elaborasi terhadap pembinaan *civic virtue* di bidang sosial ekonomi. Asumsi studi ini *social entrepreneurship* merupakan bagian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada aspek sosio-kultural. Dalam aspek tersebut PKn secara informal dan nonformal bisa mengorganisir aktivitas kelompok guna memberdayakan dan memperbaiki keluasan kesejahteraan warga. Dengan demikian *civic virtue* yang terdiri dari *civic disposition* serta *civic commitment* merupakan tujuan PKn dalam masyarakat yang mampu dibina oleh *community civic* melalui *social entrepreneurship*.

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penjelasan sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang masalah bagaimana eksistensi Sacita Muda Indonesia Elaborasi sebagai *social entrepreneurship* melaksanakan pembinaan *civic virtue* di bidang sosial ekonomi dan dampaknya bagi pemberdayaan dan kesejahteraan serta partisipasi warga negara dalam masyarakat. Dengan demikian peneliti mengangkat judul **“Pembinaan Civic Virtue di Bidang Sosial Ekonomi Melalui Social Entrepreneurship (Studi Kasus di Sacita Muda Indonesia Elaborasi)”**

Rina Susanti, 2022

**PEMBINAAN CIVIC VIRTUE DI BIDANG SOSIAL EKONOMI MELALUI SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
(Studi Kasus Di Sacita Muda Indonesia Elaborasi)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perustakaan.upi.edu

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan problem statement penelitian secara umum yaitu “Bagaimana pembinaan *civic virtue* di bidang sosial ekonomi melalui *social entrepreneurship*?”

Secara khusus spesifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi Sacita Muda Indonesia Elaborasi sebagai *social entrepreneurship* dalam upaya pembinaan *civic virtue* di bidang sosial ekonomi ?
2. Bagaimana program dan pelaksanaan program kerja Sacita Muda Indonesia Elaborasi sebagai *social entrepreneurship* dalam upaya pembinaan *civic virtue* di bidang sosial ekonomi ?
3. Bagaimana kompetensi kewarganegaraan yang dibentuk dalam proses pembinaan *civic virtue* yang dilaksanakan Sacita Muda Indonesia Elaborasi sebagai *social entrepreneurship* ?
4. Bagaimana hasil dan dampak pelaksanaan program Sacita Muda Indonesia Elaborasi sebagai *social entrepreneurship* dalam upaya pembinaan *civic virtue* di bidang sosial ekonomi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang bagaimana pembinaan *civic virtue* di bidang sosial ekonomi melalui *social entrepreneurship*.

Secara khusus penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan eksistensi Sacita Muda Indonesia Elaborasi sebagai *social entrepreneurship* dalam upaya pembinaan *civic virtue* di bidang sosial ekonomi
2. Untuk mengidentifikasi program dan pelaksanaan program kerja Sacita Muda Indonesia Elaborasi sebagai *social entrepreneurship* dalam upaya pembinaan *civic virtue* di bidang sosial ekonomi
3. Untuk mengelaborasi kompetensi sikap/karakter kewarganegaraan yang dibentuk dalam proses pembinaan *civic virtue* di bidang sosial ekonomi

Rina Susanti, 2022

PEMBINAAN CIVIC VIRTUE DI BIDANG SOSIAL EKONOMI MELALUI SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

(Studi Kasus Di Sacita Muda Indonesia Elaborasi)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perustakaan.upi.edu

yang dilaksanakan Sacita Muda Indonesia Elaborasi sebagai *social entrepreneurship*

4. Untuk menganalisis hasil dan dampak pelaksanaan program Sacita Muda Indonesia Elaborasi sebagai *social entrepreneurship* dalam rangka pembinaan *civic virtue* di bidang sosial ekonomi

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu bersifat teori, kebijakan, segi praktik maupun dari segi isu. Adapun manfaat-manfaat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara konseptual untuk :

- a. Guna memberi sumbangan secara konseptual mengenai pembinaan *civic virtue*
- b. Memotivasi tema-tema baru penelitian, khususnya penelitian tentang pembinaan *civic virtue* di berbagai bidang
- c. Melengkapi hasil penelitian sebelumnya sehingga dapat memperkaya dan memperkuat khasanah keilmuan PKn

1.4.2 Manfaat dari Aspek Kebijakan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi mengenai kebijakan dalam penumbuhan *social entrepreneurship* mengenai kebijakan yang memudahkan dalam berwirausaha dan memangkas birokrasi perizinan usaha sehingga semakin banyak jumlah *social entrepreneur*. Semakin banyak *social entrepreneur* maka akan membantu usaha pemerintah memajukan dan mensejahterakan rakyat dan pembangunan terutama pembangunan sosial ekonomi. Dengan demikian pembinaan *civic virtue* secara informal dapat terlaksana dengan baik.

1.4.3 Manfaat Praktis

Peneliti mengharapkan secara praktis mampu memberikan manfaat bagi

Rina Susanti, 2022

PEMBINAAN CIVIC VIRTUE DI BIDANG SOSIAL EKONOMI MELALUI SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

(Studi Kasus Di Sacita Muda Indonesia Elaborasi)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perustakaan.upi.edu

pihak-pihak berikut :

- a. Untuk peneliti berguna menjadi materi untuk mengembangkan pembinaan *civic virtue* melalui *social entrepreneurship*
- b. Bagi *social entrepreneur* baik di Perguruan Tinggi, dalam organisasi, perusahaan maupun komunitas agar memiliki sikap *social entrepreneurship* untuk membantu kemandirian masyarakat sebagai pembinaan *civic virtue*
- c. Dapat menjadi alternatif referensi untuk berbagai kalangan yang membutuhkan mengenai pembinaan *civic virtue*

1.4.4 Manfaat Secara aspek Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan motivasi bagi masyarakat dan pelaku ekonomi untuk menjadi *social entrepreneur* untuk tidak tergantung pada pemerintah sehingga tujuan negara Republik Indonesia memajukan kesejahteraan umum dapat terwujud. Negara Indonesia akan benar-benar menjadi negara maju dan madani (*civil society*). Hal ini dapat dijadikan sebagai pembinaan *civic virtue*.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Tesis ini terdiri dari lima bab terdiri dari: bab kesatu yakni Pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis. Bab kedua tentang Kajian Pustaka. Bab ini berisi tentang teori, konsep, pendapat, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Bab ketiga yaitu Metode Penelitian. Bab ini berisi penjelasan mengenai desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pemeriksaan keabsahan data. Bab keempat yaitu Temuan dan Pembahasan. Dalam bab ini diuraikan temuan penelitian di lapangan dan pembahasan berupa analisis dari hasil penelitian. Bab kelima yakni Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi, berisi uraian tentang jawaban pertanyaan penelitian. Memuat penafsiran dan pemeknaan

Rina Susanti, 2022

PEMBINAAN CIVIC VIRTUE DI BIDANG SOSIAL EKONOMI MELALUI SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

(Studi Kasus Di Sacita Muda Indonesia Elaborasi)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perustakaan.upi.edu

penelitian terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian, serta rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan